

Keadilan Sosial dan Ilmu Ekonomi

Oleh: F. Magnis Suseno

SUDAH dicatat oleh banyak pengamat, bahwa ilmu ekonomi seakan-akan enggan menyibukkan diri dengan masalah kemiskinan dan keadilan. Seakan-akan masalah itu terlalu kecut, terlalu ruwet, terlalu kompleks untuk dirumuskan dalam bahasa ilmu itu. Padahal masalah kemiskinan dan pemerataan merupakan masalah utama dalam banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Nah, dalam situasi yang menyedihkan ini terbitlah sebuah buku mungil dari pena Profesor Dr. Mubyarto: *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* (Yayasan Agro Ekonomika, Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta, 1980, 94 halaman). Ahli ekonomi pertanian itu menemukan, bahwa kemandulan ilmu ekonomi terhadap masalah kemiskinan dalam ilmu itu "kurang memberikan perhatian pada aspek-aspek non-ekonomi" (87). Untuk mengatasi kepicikan itu diusulkannya suatu "metoda transdisiplin". Yang dimaksud bukan hanya kerjasama antar-pelbagai ilmu sosial saja (yang, katanya, memang sangat sulit untuk menghasilkan sesuatu), melainkan para ilmuwan, misalnya para ekonom, melepaskan fanatisme terhadap ilmunya sendiri dan bersikap skeptis terhadapnya, sedangkan di lain pihak betul-betul memperhatikan hasil ilmu-ilmu lain, dan memasukkan nya ke dalam kerangka pemikirannya sendiri.

Mubyarto menerangkan metode ini dengan menunjukkan, bagaimana input-input dari pelbagai ilmu sosial dapat menyuburkan ilmu ekonomi dalam menangani masalah-masalah yang sampai sekarang seakan-akan tidak terpecahkan, seperti masalah kemiskinan di desa, pembagian pendapatan yang merata, korupsi. Ia tidak menawarkan pemecahan-pemecahan sendiri. Tetapi ia sekurang-kurangnya menunjukkan, bahwa pendekatan yang tidak memakai metode transdisiplin itu, tidak akan memberikan hasil-hasil kongkrit yang memuaskan.

Membaca uraian Mubyarto, misalnya, tentang hasil-hasil penelitian antropologi, kita bisa menjadi berfikir-fikir. Diperlihatkan dengan jelas suatu ketidakseimbangan. Di satu pihak si antropolog. Tak dapat diragukan bahwa dia dapat mencapai suatu pengertian tentang masyarakat

yang ditelitinya, yang jauh lebih mendalam daripada apa yang bisa tercapai oleh kaum sosiolog, ekonomi, apalagi kaum politolog. Tetapi kalau dia diminta suatu rencana pembangunan, dia akan menjadi bingung.

Sedangkan di lain pihak, kalau yang diminta itu seorang ekonom, dalam waktu tidak terlalu lama rencana itu akan ada. Tetapi karena pengertiannya hanya sektoral, rencana pembangunan dalam pelaksanaannya belum tentu akan menghasilkan perbaikan-perbaikan bagi seluruh masyarakat yang diharapkan. Malah bisa mencelakakannya. Jelaslah bahwa suatu pendekatan transdisiplin akan dapat menguntungkan.

Dalam hubungan ini muncul masalah rasionalitas ilmu ekonomi. Mubyarto membicarakan, bahwa misalnya perilaku ekonomi suku Trobriand, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi, alias tidak rasional.

TETAPI mari kita mengambil sikap yang sering dihubungkan dengan orang Jawa, yaitu bahwa "mangan ora mangan nek kumpul" (makan tidak makan asal berkumpul). Apakah sikap ini memang tidak rasional? Kalau mereka merasa bahwa yang paling penting bagi mereka adalah hubungan antara mereka, bahwa mereka baru merasa bahagia kalau hubungan itu erat dan akrab, kalau mereka lantas membuat terpeliharanya hubungan itu menjadi tujuan segala usaha mereka, termasuk usaha ekonomis, apakah itu irasional? Bukankah yang irasional justru suatu sistem ekonomis yang menomor-satukan penambahan produksi saja, kemudian menciptakan kebutuhan-kebutuhan buatan, agar hasil produksi itu bisa terjual dan dalam keseluruhan itu tak pernah bertanya, apa yang sebenarnya diperlukan manusia untuk mencapai kebahagiaan?

Mubyarto kemudian menerapkan antropologi ekonomi itu pada Indonesia. Dikatakan bahwa pemerataan yang sekarang diusahakan sangat sesuai dengan kerangka pemikiran semacam itu, karena dengan demikian prinsip pasar telah dilepaskan. Sebagai contoh disebutkan antara lain, Keppres No. 14/1980

Tetapi apakah di sini tidak

dicampurkan dua hal sikap-sikap ekonomis spontan dalam masyarakat tradisional (yang tidak mengikuti prinsip pasar) di satu pihak, dan suatu kebijaksanaan terencana yang dengan sadar mengadakan suatu pilihan antara pelbagai alternatif, di mana yang dipilih adalah model pemerataan? Bukankah ekonomi di negara-negara sosialis pun tak ditentukan oleh hukum pasar, padahal tak ada hubungan sama sekali dengan ekonomi naif pra-industri?

Pengaruh sikap-sikap tradisional dalam pembangunan, menurut hemat saya, lebih tepat dapat dimengerti dalam kerangka faham Gunnar Myrdal tentang "soft states", yang juga disebut-sebut oleh Mubyarto. Yaitu kebijaksanaan ekonomis Pemerintah (entah untuk mengadakan ekonomi pasar murni, entah untuk lebih meratakan pendapatan, pokoknya bersifat terencana dan tekonkratis) dalam pelaksanaannya akan dilarutkan (alias dibabat) oleh sikap-sikap tradisional dalam masyarakat, khususnya pada orang-orang yang menduduki aparatur negara, sehingga rencana-rencana itu tinggal verbal saja dan kebiasaan-kebiasaan ekonomis tradisional, terutama yang bersifat eksploitatif, berjalan terus di bawah bendera bahasa teknokrasi.

MAKA saya juga kurang melihat, bagaimana pemakaian pertimbangan-pertimbangan keadilan sosial menunjukkan pada pengaruh kebiasaan-kebiasaan dari jaman tradisional (52). Keadilan sosial sebagai kewajiban Pemerintah untuk meratakan pendapatan adalah suatu faham moderen, yang sebagaimana ditegaskan Mubyarto (50), tidak ada sangkut-pautnya dengan proses-proses ekonomis antara desa dan kraton dulu.

Menurut hemat saya, dalam rangka metoda transdisiplin lebih probabel, bahwa pengaruh sikap-sikap tradisional justru condong untuk menyulap segala usaha pemerataan (Mubyarto menyebut proyek-proyek Inpres sebagai contoh) menjadi bentuk-bentuk pungutan atau eksploitasi baru atas rakyat, yang memperkaya para pejabat, seperti sejak dahulu kala dijalankan oleh para pengusaha feodal.

Bahwa fenomena korupsi menuntut pendekatan transdisiplin, ini diperlihatkan secara meyakinkan dengan mendekatinya dari

perspektif pelbagai ilmu sosial. Yang bagi saya cukup menarik ialah, bahwa pendekatan-pendekatan itu semuanya tinggal deskriptif belaka, dan karena itu ternyata tanpa gigitan terhadap korupsi itu. Sampai Mubyarto sendiri akhirnya tidak dapat mengelak dari suatu pendekatan normatif: ia bertanya apakah korupsi dapat dibenarkan, dilihat dari segi keadilan (68 ss)? Rupanya "korupsi" adalah istilah yang normatif, dan oleh karena itu fenomenanya pun tak dapat didekati secara teknokratik melulu.

PASAL terakhir membicarakan masalah ekonomi Pancasila. Sepintas saja sudah nampak, betapa sulitnya untuk memberi isi operasional kepada istilah yang banyak diomongkan ini. Dan betapa berhati-hatilah seharusnya kita dalam mengambil-alih pelbagai pengandaian begitu saja. Misalnya, bahwa persaingan keras itu asing terhadap masyarakat Indonesia. Atau bahwa sistem koperasi mesti sesuai dengan kecondongan masyarakat kita (di mana disebutkan juga pendapat menarik dari Profesor Widjojo Nitisastro, bahwa "prinsip hubungan kekeluargaan tidak dapat dianggap identik dengan bangun usaha koperasi" 79).

Tetapi apakah secara ekonomis masuk akal, menggambarkan sistem ekonomi Pancasila sebagai "sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem (ekstrem) yang kita kenal (kapital-liberal dan sosialis komunis)" (84)? Apakah mungkin memilih segi-segi yang positif dan menolak yang negatif begitu saja, apakah ekonomi Pancasila ibarat keranjang di supermarket, dapat kita isi seandainya dengan apa yang kita senang dari dua sistem itu? Dan apakah bisa dikatakan, bahwa masyarakat "mendambakan sekali kehadiran sistem ekonomi Pancasila" (87)?

Saya khawatir, dengan bahasa semacam itu kita menipu diri. Apakah masyarakat mendambakan suatu sistem ekonomi, atau yang didambakan adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakannya? Saya merasa, bahwa di sini sang ilmuwan mendadak menjadi politikus yang harus memenangkan konsep ekonomi Pancasila.

Rupa-rupanya (seperti digarisbawahi oleh Mubyarto) ilmu eko-

nomi belum berhasil untuk memberi isi kepada faham sistem ekonomi Pancasila. Mungkin itulah sebabnya, kalau pada akhir uraian disuarakan harapan akan "kesediaan untuk di mana perlu mengorbankan kepentingan pribadi.... demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat secara keseluruhan" (87).

Saya kira, anjuran-anjuran moral seperti ini selalu memperlemah usaha-usaha ilmiah. Yang menjadi tugas para ilmuwan ialah, mencari suatu sistem ekonomi yang nyata-nyata sesuai dengan hasrat, kebutuhan, kepentingan sesungguhnya dari masyarakat, dan oleh karena itu juga akan berjalan.

Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengambil posisi normatif, tetapi harus pada tempatnya. Menurut hemat saya, akan lebih menguntungkan apabila istilah "ekonomi Pancasila" samasekali tidak difahami dalam arti operasional, melainkan sebagai istilah untuk menentukan keseluruhan tuntutan normatif, yang kita ajukan pada ekonomi kita. Tuntutan-tuntutan itu lantas dioperasionalkan oleh ilmu ekonomi dengan metoda transdisiplin.

Buku Profesor Mubyarto itu diharapkan dapat mengalihkan perhatian para ahli ilmu ekonomi pada suatu arah penelitian, yang rupa-rupanya masih baru bagi mereka. Sedangkan bagi kami, kaum awam, termuat banyak rangsangan yang pantas difikirkan lebih lanjut.